ABSTRAK

Muhammad Syukran, 220211040081 *Praktik Penjualan Anakan Ikan di Pasar Batuah Martapura Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)* Pembimbing 1 Dr. Hj Amelia Rahmaniah., M.H. dan Pembimbing II Dr. Sukarni., M.Ag Pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026

Kata kunci: Anakan ikan, pasar tradisional, hukum ekonomi syariah, hukum positif, keadilan transaksi.

Penjualan anakan ikan merupakan praktik ekonomi yang masih dilakukan dalam perdagangan tradisional dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan. Dalam konteks hukum positif, pemerintah daerah telah menetapkan regulasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, sementara dalam hukum ekonomi syariah setiap transaksi muamalah harus berlandaskan keadilan, rukun dan syarat jual beli terpenuhi, dan kemaslahatan serta terhindar dari kemudaratan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik serta dampak penjualan anakan ikan ditinjau menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pedagang dan pihak terkait, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan ketentuan hukum positif, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, serta pendekatan fikih muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan anakan ikan dilakukan melalui jual beli langsung dengan akad lisan dan pembayaran tunai. Secara rukun akad jual beli telah terpenuhi, namun ditinjau menurut hukum positif praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan peraturan daerah yang melarang penangkapan dan perdagangan ikan berukuran kecil demi menjaga kelestarian sumber daya ikan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah karena objek transaksi berpotensi menimbulkan terancamnya jumlah populasi ikan, sehingga tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Dampak penjualan anakan ikan memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi pedagang, tetapi menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Menurut hukum positif, dampak tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan sumber daya ikan. Sementara itu, dalam hukum ekonomi Dampaknya berpotensi mafsadah bergeser dari mubah menjadi makruh hingga haram menurut sadd al-dzarī'ah. *(al-'adālah baina al-ajyāl)* nilai inti maqasid Syariah Sehingga harus dibatasi atau dilarang demi kepentingan umum.

ABSTRACT

Muhammad Syukran, 220211040081. *The Practice of Selling Fish Fry at Batuah Market, Martapura, South Kalimantan: Analysis Based on Positive Law and Sharia Economic Law.* Supervisors: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Supervisor I) and Prof. Dr. Sukarni, M.Ag. (Supervisor II). Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate School, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Keywords: Fish fry, traditional market, Sharia economic law, positive law, transactional justice.

The sale of fish fry is an economic activity that continues to thrive in traditional markets and serves as a livelihood for many community members. However, this practice raises legal concerns, as it threatens the sustainability of fish resources and conflicts with environmental protection principles. Under positive law, local governments have established regulations to protect fish resources. Conversely, under Sharia economic law, every transaction (*muamalah*) must be based on justice, legal certainty, and public interest (*maslahah*), while also avoiding harm (*dharar*).

This study aims to analyze the practices and impacts of selling fish fry from both positive law and Sharia economic law perspectives. It employs field research using a qualitative approach and a normative-empirical method. Data were collected through observation, interviews with traders and relevant stakeholders, and documentation. Data analysis was performed using a descriptive-analytical method, with reference to specific provisions of positive law notably Banjar Regency Regional Regulation Number 7 of 2005 concerning the Supervision and Protection of Fish Resources as well as the *fiqh muamalah* approach within Sharia economic law.

The research results show that the practice of selling fish fry is conducted thru direct sales with verbal agreements and cash payments. In terms of the elements of the sale and purchase contract, they have been fulfilled, but from the perspective of positive law, the practice does not align with regional regulations that prohibit the capture and trade of small-sized fish to preserve fishery resources. From the perspective of Islamic economic law, the practice is not fully in accordance with the principles of muamalah because the object of the transaction has the potential to threaten the fish population, thus not aligning with the principle of justice.

The impact of selling fish fry provides short-term economic benefits for traders, but it has negative effects on the sustainability of fish resources. According to positive law, this impact contradicts the goal of protecting fish resources. Meanwhile, in economic law, the impact potentially shifts from permissible to discouraged and then to prohibited according to *sadd al-dzarī'ah. (al-'adālah baina al-ajyāl)* the core value of maqasid Shariah, thus it must be limited or prohibited for the public interest.